



LAPORAN KINERJA

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SIDOARJO**

Jl. Kombes Pol M. Duryat No. 62 Sidoarjo
(031) 8962904 satpolpp.sidoarjokab.go.id

2023



PERNYATAAN TELAH DI REVIEW

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sidoarjo, 16 Pebruari 2024

**TIM SAKIP KAB. SIDOARJO,
SEKRETARIS**



Ditandatangani secara elektronik oleh

ARIF MULYONO, S.STP., M.HP.
NIP. 197804161997021001

ARIF MULYONO, S.STP., M.HP.
Pembina Tingkat I
NIP 19780416 199702 1 001



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama tahun 2023. Diharapkan LKjIP ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders, Tanggapan (feedback) serta saran-saran untuk perbaikan terhadap laporan yang kami susun sangat kami harapkan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.

Walaikum Salam Wr. Wb.

Sidoarjo, 26 Januari 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Drs. YANY SETYAWAN
NIP. 196709301995031001

Drs. YANY SETYWAN
Pembina Tingkat I
NIP. 196709301995031001



DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
IKHITISAR EKSEKUTIF	6
BAB I PENDAHULUAN	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Startegis Tahun 2021-2026.....	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	12
C. Perencanaan Anggaran Tahun 2023	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Pengukuran Kinerja	13
B. Realisasi Kinerja Anggaran.....	19
BAB IV PENUTUP.....	23
A. Kesimpulan.....	22
B. Pemecahan Masalah/Tindak Lanjut	23
LAMPIRAN-LAMPIRAN	25



DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Data ASN dan Non Asn Satuan Polisi Pamong Praja.....	9
TABEL 1.2 Pemetaan Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah.....	10
TABEL 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2023.....	11
TABEL 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	12
TABEL 2.3 Rincian Anggaran Tahun 2023	13
TABEL 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023	14
TABEL 3.2 Tren Realisasi dairi (IK) Tahun 2023	15
TABEL 3.3 Tren Realisasi dairi (IK) Tahun 2023	15
TABEL 3.4 Tren Realisasi dairi (IK) Tahun 2023	15
TABEL 3.5 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	18
TABEL 3.6 Program Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	19
TABEL 3.7 Realisasi Anggaran.....	19



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gambar Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.....	8
Gambar 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023	11

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas perjanjian kinerja Tahun 2023 Kami memiliki 2 (satu) sasaran strategis yakni 1 (satu) sasaran strategis utama dan 1 (satu) sasaran strategis tambahan yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja pada sasaran strategis utama dan 3 (tiga) indikator kinerja pada sasaran strategis tambahan.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 6 indikator, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 indikator;
- 2) Target dengan capaian realisasi 100% sebanyak 1 indikator;
- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 indikator.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat (sesuai Perbup 106/22 Pasal 7)
1	Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakan perda dan perkada	Hasil SKM terhadap layanan trantibum	81	98.98	120.71 %	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	A (80.35)	A (81.87)	101.89 %	Sangat Baik
		Nilai RB	B (60-70)	-	Tidak ada penilaian	Tidak ada penilaian
		Nilai IPP	B (3.51)	B- (3.01)	85.75 %	Baik

Sumber : Dokumen Renstra Perubahan Tahun 2021 - 2026

BAB I **PENDAHULUAN**

1 *Kedudukan*

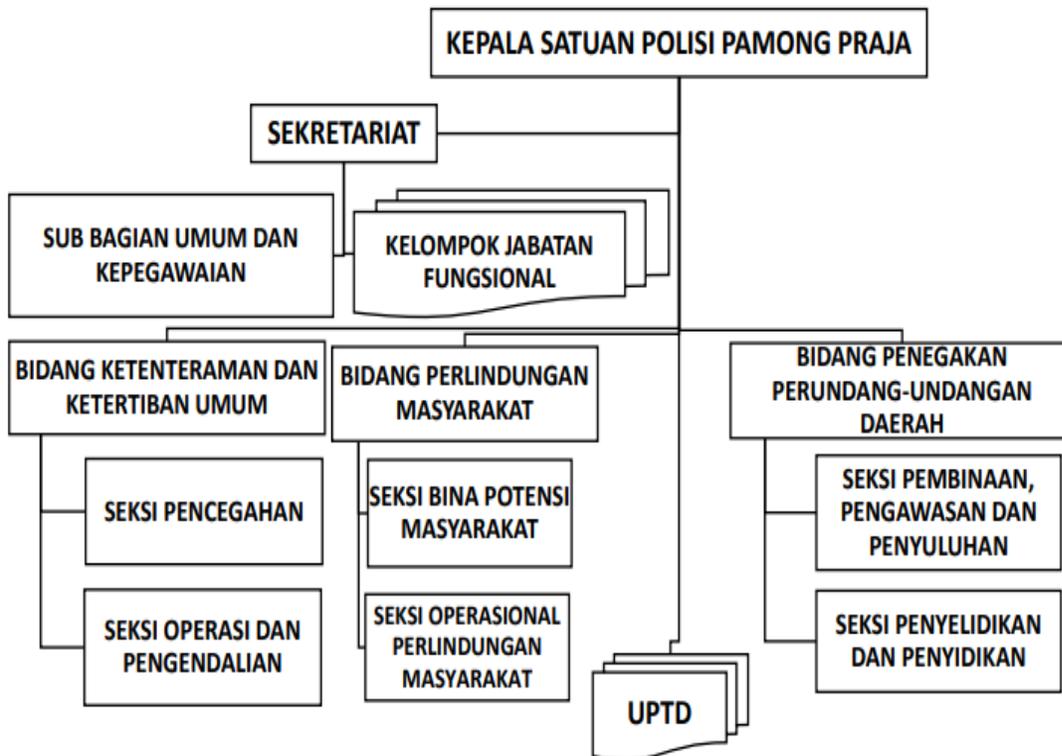
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat

Melalui peraturan daerah diatas maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Dalam melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan fungsi:

1. Perumus kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat ;
4. Pelaksanaan administrasi Satpol PP ;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo maka disusun struktur organisasi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Kepala Satuan Yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PAMONG POLISI PRAJA KABUPATEN SIDOARJO



Gambar 1.1

Sumber data : Perbup Sidoarjo No.4 Tahun 2022

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo memiliki ASN sebanyak 84 Orang. ASN tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Berikut data ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023.

Tabel 1.1

Data ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

No	Jenis Jabatan	Jumlah	Existing
1	Kepala Satuan	1	1
2	Administrator	3	3
3	Pengawas	4	4
4	Jabatan Fungsional	56	56
5	Pelaksana	23	23

Sumber data Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Aspek Strategis Organisasi

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo

Tabel 1.2

Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Masalah PKL yang berkaitan dengan tanggung.jawab pemerintah dalam Penegakan perda	Pedagang Kaki Lima	Masalah PKL yang berkaitan dengan tanggung.jawab pemerintah dalam penataan kota dan kebutuhan masyarakat kecil dalam mencari nafkah
2	Masalah perizinan sektor usaha berkaitan pengaturan dan pengawasan	Perizinan Usaha	Masalah perizinan sektor usaha berkaitan pengaturan dan pengawasan antara lain: penanaman modal, tata kota, lingkungan hidup, iklan, kebutuhan masyarakat dalam hal lapangan pekerjaan, tenaga kerja dan lain sebagainya
3	Masalah tumbuhnya bangunan liar terkait esestetika kota	Bangunan Liar	Tumbuhnya bangunan liar sebagai akibat dari arus urbanisasi masyarakat miskin ke kota untuk mencari kerja dan mendirikan usaha/rumah di bantaran sungai, jalan raya, rel, dan tanah-tanah kosong yang tidak dikontrol oleh pemiliknya
4.	Masalah tingkat Kesadaran terhadap kenyamanan lingkungan	Minimnya antusias masyarakat untuk bergabung menjadi anggota linmas desa/kelurahan	Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan di sekitarnya;

Sumber : dialog kinerja penyusunan rencana strategis

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum ;
2. Perlindungan Masyarakat
3. Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A *Rencana Strategis Tahun 2021 -2026*

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki visi Mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan”. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo adalah menunjang misi 5, yakni mewujudkan masyarakat religious yang berpegang teguh pada nilai – nilai keagamaan serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Sidoarjo maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2026. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Berikut Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2026. sebagai berikut :

Tabel 2. 1

*Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2021 – 2026*

NO	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Sidoarjo aman, tertib dan tentram	Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat serts ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakan perda dan perkara	Hasil SKM terhadap layanan tibusmanmas	79	80	81	82	83	84
2.		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	A	A	A	A	A
			Nilai RB	B	B	B	B	A	A
			Nilai IPP	B-	B-	B	B	A	A

Sumber : Dokumen Renstra Perubahan Tahun 2021 - 2026



Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Sidoarjo maka dirumuskan tujuan dan sasaran dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan yang akan kami dukung adalah menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan dengan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran berkembangnya nilai – nilai budaya dan agama serta toleransi dalam masyarakat dan terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram. Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo menetapkan tujuan yaitu:

- a) Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Sidoarjo periode 2021 –2026.
- b) Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan
- c) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan Ketenteraman dan Ketertiban.
- d) Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.

dengan sasaran yaitu meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum dengan penegakan perda dan perkada.

B Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya. Berikut Perjanjian kinerja perubahan tahun 2023 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja.

Tabel 2. 2
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat serta Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Penegakan Perda dan Perkada	Hasil SKM terhadap layanan trantibum	82
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	A (80.35)
		Nilai IPP	B (3.51)

- Dengan ditetapkannya Permenpan No 03 tahun 2023 tentang Perubahan Permenpan No 25 Tahun 2020 tentang Roodmap Reformasi dan Birokrasi Tahun 2020-2024, untuk penilaian PMPRB tidak ada penilaian. Sehingga tidak dicantumkan pada tabel diatas.

Sumber : Dokumen Perjanjian Kerja Perubahan Kepala Satuan Tahun 2023

C Perencanaan Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka disediakan anggaran sebesar Rp. 27.055.930.431 Namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, maka anggaran yang telah tersedia dilakukan perubahan dan *refocusing*. Oleh Karena itu, alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. Rp. 26.245.084.514 dengan rincian sebagai mana tabel 2.3.

Tabel 2. 3

Rincian anggaran pada tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 15.439.355.853
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 10.805.728.661
Jumlah		Rp. 26.245.084.514

Sumber data : aplikasi Sistem Informasi keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi setiap indikator kinerja program dan didukung dengan data-data yang relevan untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi dalam mencapai target Indikator Kinerja Utamanya (IKU) yang telah tertuang dalam tujuan dan sasaran strategis instansi.

Adapun capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
1	Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat serts ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakan perda dan perkada	Hasil SKM terhadap layanan trantibum	82	98.98	120,71 %	84	122,19 %
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	A (80.35)	A (81.87)	101,89 %	A	101,89 %
		Nilai IPP	B	B-	85,75 %	A	74.87 %

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 3 indicator, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
- 2) Target dengan capaian realisasi 100% sebanyak 0 indikator;
- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.nalui

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023 dapat disimpulkan bahwasannya, dari 3 indikator terdapat 1 indikator yang tidak mencapai 100 %. Sedangkan apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir renstra tahun 2026, 3 (tiga) indikator tersebut telah melebihi 50 %. Dan apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi 2 tahun sebelumnya telah terjadi peningkatan yang signifikan. Penyebab keberhasilan yang mendukung tercapainya indikator diatas antara lain, koordinasi dan kerjasama yang baik antar pelaksana dengan atasan langsung dan Kepala Satuan. Untuk peyebab kegagalan diantaranya kualitas sumber daya manusia yang menangani dan kurangnya koordinasi atas hal yang diampu. Efisiensi anggaran pada ketiga indikator tersebut terjadi pada indikator 1 dan 2 yakni pada angka angka 20.47 % dan 2.09% sedangkan pada indikator 3 tidak terjadi efisiensi anggaran yakni – 7.06 %, sehingga dapat disimpulkan serapan anggaran lebih baik daripada capaian kinerja. Faktor yang mendukung keberhasilan program koordinasi dan kerjasama yang baik antar pelaksana dan atasan langsung dan Kepala Satuan, sehingga terciptanya sinkronisasi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat serts ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakan perda dan perkara

a) Indikator Kinerja (IK) : Hasil SKM terhadap layanan trantibum

Target	Realiasasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
82	98.98	120,71 %	81	122,19 %

Sumber data : Dokumen Evaluasi Internal PD

Capaian indikator kinerja (IK) Hasil SKM terhadap layanan trantibum tahun 2023 dengan realisasi 98.98 dari target 81 dengan persentase sebesar 120,71 %. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 84, maka pada tahun 2023 sudah tercapai nilai 98.98, dengan persentase capaian sebesar 122,19 % Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan atau tren meningkat (kalau terjadi peningkatan), sebagaimana table berikut :

Tabel 3. 2

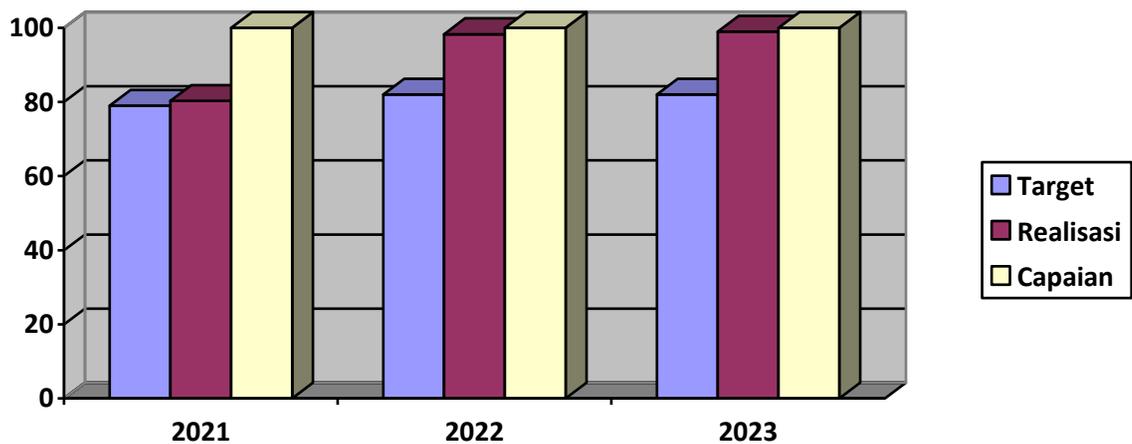
Tren Realisasi dari (IK) Tahun 2021 – 2023

Tahun	2021	2022	2023
Target	79	80	81
Realisasi	80.38	98.29	98.98
Capaian	102 %	123 %	120.71 %

Sumber data : Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban PD

Grafik 3. 2

Tren Realisasi dari (IK) Tahun 2021 – 2023



Sumber : Olah Data Laporan Pertanggung Jawaban PD

Demikian halnya jika dibandingkan dengan Instansi sejenis seperti Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 nilai SKM sebesar 88.33, maka realisasi kinerja tahun 2023 sudah melebihi standar dengan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, dikarenakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap link survey yang disebarluaskan kepada penerima layanan.

Jika pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya nilai Survey Kepuasan Masyarakat sesuai arahan Bagian Organisasi Pemkot Surabaya di Rekap bulanan untuk bulan Desember Tahun 2023 berada pada angka 100 yang artinya memuaskan.

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Analisa penyebab keberhasilan apakah meningkat adalah pemantauan terhadap link survey, kendala yang ada antara lain, kurang pemahamannya penerima layanan pada point point yang harus diisikan sehingga pada beberapa penerima layanan butuh pendampingan serta upaya yang akan dilakukan adalah pemantauan dan evaluasi berkala.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan

a) IK 1 : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
A (80.35)	A (81.87)	101,89 %	A	101,89 %

Sumber data : Dokumen Evaluasi Internal PD

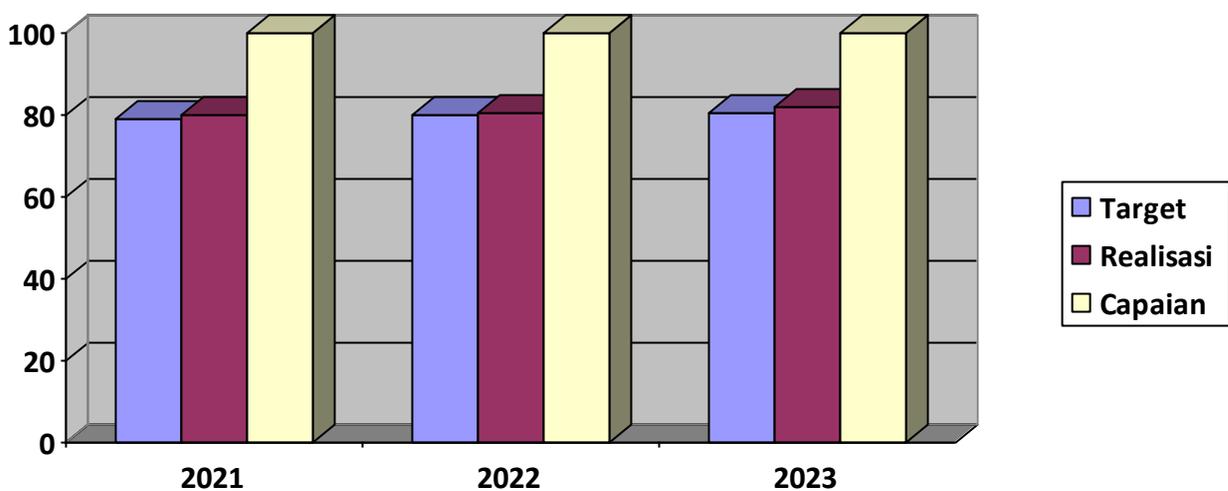
Capaian indikator kinerja (IK) Nilai SAKIP tahun 2023 dengan realisasi A dari target A, dengan persentase sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target A., maka pada tahun 2023 sudah tercapai tercapai nilai A, dengan persentase capaian sebesar 100%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan atau tren meningkat pada nilai atau skor dari evaluator di sebagaimana table berikut :

Tabel 3. 3
Tren Realisasi dari (IK) Tahun 2021 – 2023

Tahun	2021	2022	2023
Target	B (79.00)	A (80.05)	A (80.35)
Realisasi	BB (80.05)	A (80.34)	A (81.78)
Capaian	101..32 %	100.36 %	101.89 %

Sumber data : Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban PD

Grafik 3. 3
Tren Realisasi dari (IK) Tahun 2021 - 2023



Sumber : Olah Data Laporan Pertanggung Jawaban PD

b) IK 2 : Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Target	Realiasasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
B (3.51)	B- (3.05)	85.75 %	A	67.47 %

Sumber Data : Dokumen Evaluasi Internal PD

Capaian indikator kinerja (IK) B- tahun 2023 dengan realisasi B (3.01) dari target B- (3.5 1) , dengan persentase sebesar kurang dari 100 %. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target A (4.01) , maka pada tahun 2023 tidak tercapai nilai B- (3.01) , dengan persentase capaian sebesar kurang dari 100 %.

Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja Pelayanan Publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia yang terdiri dari 6 (Enam) aspek

Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi.

*Tabel 3. 4
Tren Realisasi dari (IK) Tahun 2021 – 2023*

Tahun	2021	2022	2023
Target	B- (3.01)	B- (3.01)	B (3.51)
Realisasi	B- (3.01)	B- (3.01)	B- (3.01)
Capaian	100 %	100 %	85.75 %

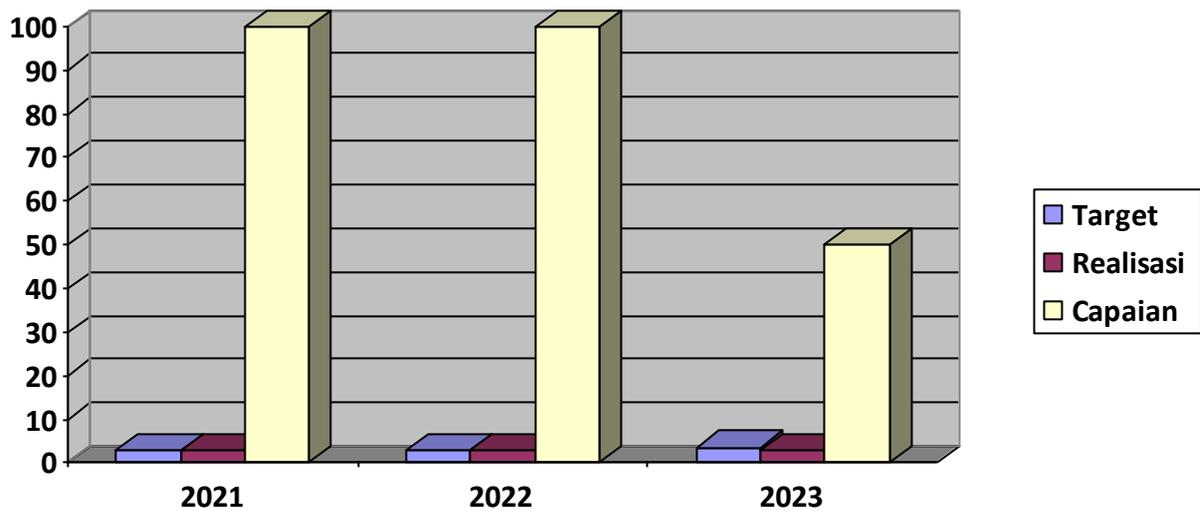
Sumber data : Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban PD

Indikator Indeks Pelayanan Publik dalam hal ini tidak bisa kami bandingkan dengan Instansi Sejenis maupun nasional dikarenakan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa timur dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya pada Tahun 2023 hingga dokumen ini disahkan belum mendapatkan pemberitahuan nilai dari Bagian Organisasi setempat.

Selanjutnya dari data diatas dilakukan analisa penyebab kegagalan tidak tercapainya nilai Indikator tersebut diatas adalah rendahnya nilai indeks pada Formulir-01 yakni pada angka 1.27, kendalanya antara lain kurangnya koordinasi antara staf teknis dan pejabat sub koordinator sebagai evaluator hasil pekerjaan pada bidang Sekretariat, upaya yang sudah dilakukan adalah mengkomunikasikan sejak dini hasil rekomendasi yang telah disahkan oleh bapak Pj. Sekretaris Daerah dan upaya kedepan yang akan dilakukan mencukupi dan menyiapkan 6 (Enam) aspek yang menjadi catatan dalam rekomendasi.



Grafik 3. 4
Tren Realisasi dari (IK) Tahun 2021 - 2023



Sumber : Olah Data Laporan Pertanggung Jawaban PD

B Realisasi Kinerja Anggaran

1) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran;

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara perkalian pagu anggaran dengan capaian Kinerja dan realisasi anggaran dengan perkalian pagu anggaran dengan capaian kinerja

Tabel 3.5
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakan perda dan perkada	Hasil SKM terhadap layanan trantibum	82	98.98	120.71 %	12.588.368.453	12.084.594.198	96%	20.47%
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	A (80.35)	A (81.87)	101.89 %	12.805.075.826	12.774.982.085	99.76%	2.09%
	Nilai IPP	B (3.51)	B- (3.01)	85.75 %	1.248.444.256	1.152.446.064	92.31%	-7.64%

Terkait pagu anggaran pada sasaran pemerintahan yang tidak bisa dijabarkan untuk tiap-tiap indikator, maka dilakukan perhitungan untuk menghitung capaian dengan menggunakan rumus :

$$CKP = \prod_{i=1}^m \left(\left(\left(\prod_{j=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator}_j}{\text{Target Indikator}_j} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CKP : Capaian Keluaran (*Output*) Program

m : Jumlah Keluaran (*Output*) Program

n : Jumlah indikator Keluaran (*Output*) Program

Pengukuran dilakukan dengan mengalikan semua capaian indikator, kemudian diakarpangkatkan dengan banyaknya jumlah indikator tersebut

Sehingga berdasarkan tabel diatas, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

- Indikator Hasil SKM terhadap layanan trantibum dengan tingkat efisiensi sebesar 20.47 % yang disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain:
 - Perencanaan dan penanganan yang baik
 - Koordinasi dan komunikasi yang baik antara pelaksana ke atasan langsung maupun ke Kepala Satuan
- Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator Nilai SAKIP terjadi tingkat efisiensi sebesar 2.09 % yang disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain:
 - Profesionalisme Sumber Daya Manusia atau staf pelaksana
 - Kinerja maksimal dalam pemenuhan dan pengolahan data

- Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator Nilai IPP *tidak terjadi* efisiensi yang disebabkan oleh faktor kegagalan antara lain:
 - Kurangnya Profesionalisme Sumber Daya Manusia atau staf pelaksana
 - Kurang maksimalnya dalam pemenuhan dan pengolahan data
 - Tidak terjadi Koordinasi dan komunikasi yang baik antara pelaksana ke atasan langsung maupun ke Kepala Satuan

2) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Tabel 3. 6

Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakan perda dan perkada	Hasil SKM terhadap layanan trantibum	120.7 %	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	12.588.368.453	12.084.594.198	96%
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	101.8 %	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	12.805.075.826	12.774.982.085	99.76%
	Nilai IPP	85.7 %		1.248.444.256	1.152.446.064	92.31%

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternative solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan, berikut alternative solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja :

1. Perencanaan kinerja yang lebih detail, baik pada tingkat kegiatan, juga perencanaan pada tingkat instansi dengan memperhatikan aspek sumber daya ;
2. Perlu kesinambungan dan keselarasan antara perencanaan kegiatan dan anggaran, pelaksanaan kegiatan, monitoring kegiatan, evaluasi hingga pelaporan kegiatan ;
3. Diperlukan koordinasi yang baik antar personil di dalam OPD, juga koordinasi dengan OPD lain bahkan dengan instansi vertical yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan saling mendukung pada tercapainya kinerja organisasi.

3) Realisasi Anggaran

Tabel 3. 7
Realisasi Anggaran

Program	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.612.907.916	15.774.982.085	94.96%
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.588.368.453	12.084.594.198	96.00%
Jumlah	29.201.276.369	27.859.576.283	95.41%

Pada Indikator kinerja tambahan perlu dilakukan peningkatan pada point Indeks Pelayanan Publik, walaupun sudah tercapai sesuai target, namun terdapat beberapa catatan yang harus ditingkatkan pada tahun depan. Untuk indicator yang lain semua telah tercapai sesuai target yang diharapkan.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan secara optimal diantaranya menata ulang/plotting jadwal personil membagi sesuai porsi kegiatan dan urgensi kegiatan ;
2. Memaksimalkan pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran sesuai pagu anggaran yang terjadi setelah rasionalisasi.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi/tidak dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal/tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran pertama adalah sebagai berikut:

1. Menyusun ulang skema kegiatan yang telah disusun sebelumnya sesuai pagu anggaran yang telah ditetapkan sebelum rasionalisasi ;
2. Memaksimalakan jumlah personil dan sarana serta prasarana dalam kegiatan.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional maka capaian ini lebih rendah/tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan/tidak signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi Jawa Timur/Nasional.



BAB IV PENUTUP

A *Kesimpulan*

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2023 yaitu 100 % Sasaran dengan kategori sangat berhasil, Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakan perda dan perkara sebagai Sasaran utama termasuk dengan kategori berhasil, dst. Namun begitu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan, sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat optimal.

Untuk sasaran yang dikategorikan belum berhasil, kendala yang dihadapi antara lain :

1. Kurangnya Profesionalisme SDM ;
2. Kurangnya koordinasi antara staf pelaksana kepada atasan langsung, Kepala Satuan dan Leading sector.
3. Kurangnya pemahaman dan pemenuhan data.

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada indikator Indeks Pelayanan Publik kami kategorikan belum berhasil dikarenakan point tidak bertambah dan stuck di point seperti pada tahun sebelumnya.

Pada Indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik perlu dilakukan peningkatan pada point tersebut diatas, terdapat beberapa catatan yang harus ditingkatkan pada tahun depan. Untuk indicator yang lain semua telah tercapai sesuai target yang diharapkan.

B *Pemecahan Masalah / Tindak lanjut*

Untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa cara pemecahan masalah, antara lain:

- 1) Perencanaan kinerja yang lebih detail, baik pada tingkat kegiatan, juga perencanaan pada tingkat instansi dengan memperhatikan aspek sumber daya
- 2) Perlu kesinambungan dan keselarasan antara perencanaan kegiatan dan anggaran, pelaksanaan kegiatan, monitoring kegiatan, evaluasi hingga pelaporan kegiatan
- 3) Diperlukan koordinasi yang baik antar personil di dalam OPD, juga koordinasi dengan OPD lain bahkan dengan instansi vertical yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan saling mendukung dan berujung pada tercapainya kinerja organisasi.



Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan yang sudah diuraikan pada Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2023. Upaya ini juga mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya.

Namun demikian beberapa hal perlu menjadi focus bagi perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja ke depan. Pertama walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan tantangan ini terutama Nampak dalam kondisi terkait berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat dimana masih terdapat berbagai pelanggaran peraturan perundang-undangan, kondisi ketentraman dan ketertiban yang tidak kondusif dikarenakan konflik antar masyarakat, konflik antar kepentingan.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara dengan menyediakan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kedua sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKJIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang, beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun demikian harus ada rencana tindak lanjut dan dilanjutkan dengan upaya konkret untuk melaksanakan perbaikan dalam berbagai hal sehingga menjadikan LKJIP benar benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk dipergunakan sebagai dasar peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan public. Seluruh personil di Satuan Polisi Pamong Praja harus saling mendukung untuk terciptanya perbaikan kinerja dimasa yang akan datang tentunya dengan dukungan penuh dan pengawalan ketat oleh pimpinan OPD.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. *Perjanjian Kinerja Tahun 2023*

1. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah

(https://drive.google.com/drive/folders/1icoGY1yH8U1Ka_NZNVvh1U5MayZZTOq)

B. *Indikator Kinerja Utama Tahun 2023*

Dok. SK. Kepala Perangkat Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

(<https://drive.google.com/drive/folders/1hyknSJbyLQxeg3-DsDBYd8pOmYBDF44->)

C. *Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2023*

Dok. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2022

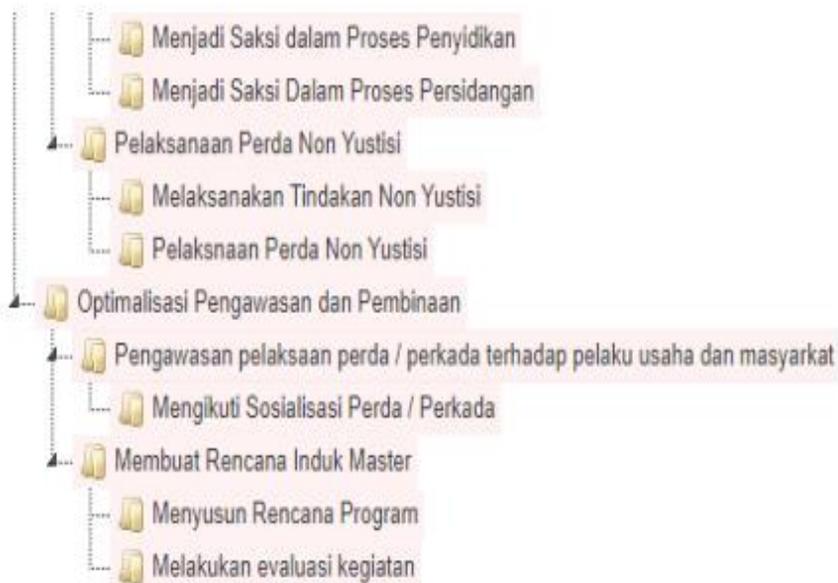
(<https://drive.google.com/drive/folders/1hyknSJbyLQxeg3-DsDBYd8pOmYBDF44->)

D. *Pohon Kinerja yang menunjang sasaran kinerja 2023*

Dokumen ambil di SKP (Screenshoot)

(<https://drive.google.com/drive/folders/1zGH3jLpzqqXhnmK-W1m9ZC9KoJnpEnkn>)







E. Capaian Prestasi / Penghargaan Perangkat Daerah Tahun 2023

- Dokumentasi Penghargaan yang diterima

(<https://drive.google.com/drive/folders/1hyknSJbyLQxeg3-DsDBYd8pOmYBDF44->)

F. Matriks Renstra

- Matriks Renstra Perubahan

(<https://drive.google.com/drive/folders/1hyknSJbyLQxeg3-DsDBYd8pOmYBDF44->)

G. LHE SAKIP Tahun 2022

- LHE SAKIP Tahun 2022

(<https://drive.google.com/drive/folders/1hyknSJbyLQxeg3-DsDBYd8pOmYBDF44->)

H. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun 2022

- Tanggapan/Tindak lanjut SAKIP Tahun 2022

(<https://drive.google.com/drive/folders/1hyknSJbyLQxeg3-DsDBYd8pOmYBDF44->)

I. Bukti Dukung Pengukuran Kinerja Setiap Indikator Kinerja

- Bukti Dukung Pengukuran Kinerja Setiap Indikator Kinerja

(<https://drive.google.com/drive/folders/1hyknSJbyLQxeg3-DsDBYd8pOmYBDF44->)